

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadist

B. Buku

Abdul Muhith, *Pendidikan Keperawatan Jiwa (Teori dan Aplikasi)*, (Yogyakarta: ANDI, 2015);

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010);

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Gunung Agung, 2002)

Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004);

Andri Cahayadi, *Peran Notaris dalam Membantu Menyelesaikan Masalah Waris melalui Pembuatan Keterangan Waris*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2011);

Arie S. Hutagalung, *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*, (Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, 2005);

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007);

Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004);

Daeng Naja, *Teknik Pembuatan Akta*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012);

Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011);

H.F.A Vollmar, Terjemahan Adiwimarta, *Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid 1*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996);

H. Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016);

Habib Adjie, *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris dan PPAT*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bhakti, 2014);

Hans Kelsen. *General Theory of Law and State. Cetakan VII*, (Bandung: Nusa Media, 1971);

- Harsono, *Perkembangan Pengaturan Kewarganegaraan*, (Yogyakarta: Liberty, 2012);
- Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1985);
- L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Ke-Dua Puluh Enam*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996);
- Laura Chrismetin, *Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) Terhadap Pembagian Waris Dalam Hukum Islam Atas Tanah Dan Bangunan Di Kabupaten Brebes*, (Tegal: Universitas Pancasakti, 2019);
- Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remaja Rusdakarya, 1993);
- Mirzaqon. T, dan Purwoko, *Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Dan Praktik Konseling Expressive Writing*, (Surabaya: Universitas Negeri Surabaya , 2017);
- P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016);
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Kencana Prenada, 2010);
- Peter, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008);
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* , (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000);
- Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Prespektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat Edisi Revisi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010);
- Suhrawardi K. Lunis, *Etika Profesi Hukum, Cetakan Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000);
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010);
- Urip Santoso, *Pendaftaran Tanah dan Peralihan Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014);
- Yosvita Prasetyaningtyas, *Hukum untuk Orang Awam*, (Yogyakarta: Efata Publisng, 2014).

C. Jurnal dan Karya Ilmiah

- Deni Nuryadi, *Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya Di Indonesia*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa, Vol.1/No.2/September 2016;

Inge Dwisvimiari, *Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*, Jurnal Dinamika Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Vol. 11/No. 3/September 2011;

Tatik Arjiati, *Peran Notaris/PPAT dalam Pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) terhadap Pembagian Waris yang Berbeda Agama atas Tanah dan Bangunan*, Jurnal Akta Universitas Islam Sultan Agung, Vol.4/No.1/2017.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 tentang Gagasan Menganggap *Burgerlijk Wetboek* Tidak Sebagai Undang-Undang

Kompilasi Hukum Islam

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

E. Internet

<https://dunianotaris.com/seputar-akta-pembagian-hak-bersama-aphb.php>;

[http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/46131\](http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/46131)

<https://hellosehat.com/mental/mental-lainnya/keterbelakangan-mental/>

https://medianotaris.com/teknik_pembuatan_akta_ppat_versi_perkaban_berita338.htm
1

<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2014/08/09/data-sekunder-dalam-penelitian-hukum-normatif/>

<https://www.99.co/blog/indonesia/seluk-beluk-aphb/>

<https://www.halodoc.com/kesehatan/retardasi-mental>

<https://www.kennywiston.com/sekilas-tentang-hukum-pengampuan/>

